BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Deskripsi Daerah Kabupaten Sleman

1. Sejarah Kabupaten Sleman

Mengungkap sejarah merupakan perjalanan yang rumit dan melelahkan. Setidaknya pengalaman tersebut dapat dipetik dari upaya Dati II Sleman untuk menentukan hari jadinya. Setelah melalui pembahasan, penelitian, dan perdebatan bertahun-tahun, akhirnya hari jadi Kabupaten Dati II Sleman disepakati. Perda nomor 12 tahun 1998 tertanggal 9 oktober 1998, menetapkan tanggal 15 Mei 1969 merupakan hari jadi Kabupaten Sleman. Di sini perlu ditegaskan bahwa hari jadi Sleman adalah hari jadi Kabupaten Sleman, bukan hari jadi Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman. penegasan ini diperlukan mengingat keberadaan Kabupaten Sleman jauh sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai wujud lahirnya Negara Republik Indonesia modern, yang memunculkan Pemerintah Kabupaten Dati II Sleman.

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman.

Dalam hitungan Almanak, hari jadi Kabupaten Sleman jatuh pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rajab tahun ke 1846 Wuku Wayang. Atas dasar perhitungan tersebut ditentukan surya sengkala (perhitungan tahun masehi) Rasa Manunggal Hanggatra Negara yang memiliki arti Rasa = 6, manunggal = 1, Hanggatra = 9, Negara = 1, sehingga terbaca tahun 1916. Sementara menurut perhitungan jawa (Candra Sengkala) hari jadi Kabupaten Sleman adalah Anggana Catir Salira Tungal yang berarti Anggana =6, Catur = 4, Salira = 8, Tunggal = 1, sehingga terbaca tahun 1846. Kepastian keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman didasarkan pada Rijksblad nomor 11 tertanggal 15 Mei 1916. Penentuan hari jadi Kabupaten Sleman dilakukan melalui penelaah berbagai ,ateri dari berbagai suber informasi dan fakta sejarah.

2. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis yang menjadi penghubung Kota Yogyakarta dengan Magelang Jawa Tengah. Berdasarkan Data yang didapat dari Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2016, secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

PETA DESA WISATA
KABUPATEN SLEMAN

PETA DESA WISATA
KABUPATEN SLEMAN

DV Tuniny

DV Tuniny

Fro Company

Fro

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Sleman

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman Tahun 2011

b. Luas Wilayah

Berdasarkan Data yang didapat dari Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2016, luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2, dengan jarak terjauh Utara–Selatan 32 Km, Timur–Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.

c. Wilayah administratif

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
		Desa	Dusun		(Jiwa)	(Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	69	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,538
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman

Seperti pada tabel 2.1 untuk jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman berjumlah 17 Kecamatan. Untuk jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Depok dengan jumlah 109.092 jiwa. Luas wilayah yang terbesar di Kecamatan Cangkringan seluas 4.799 Ha. Kemudian Desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel dengan jumlah 8 Desa dan Dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Tempel dengan jumlah Dusun sebanyak 98 Dusun.

3. Kondisi Demografi

a. Pertumbuhan Peduduk

Struktur kependudukan Kabupaten Sleman terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Struktur Penduduk Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Struktur	Jumlah	Jumlah	Total
	Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan	
1.	0 - 4	32.088	30.285	62.372
2.	5 – 9	38.799	36.371	75.170
3.	10 - 14	40.252	37.453	77.705
4.	15 – 19	37.461	35.289	72.750
5.	20 - 24	37.095	36.334	73.429
6.	25 - 29	49.703	50.034	99.727
7.	30 - 34	55.938	54.872	110.810
8.	35 – 39	51.435	51.699	103.134
9.	40 - 44	48.386	48.432	96.818
10.	45 – 49	39.475	40.390	79.865
11.	50 – 54	32.822	34.389	67.211
12.	55 – 59	26.945	26.944	53.889
13.	60 – 64	17.862	19.636	37.498
14.	65 – 69	16.253	18.349	34.602
15.	70 – 74	13.219	16.037	29.252
16.	75 ke atas	21.569	29.553	51.122
	Total	559.302	566.067	1.125.369

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman

Dapat dilihat pada tabel 2.2 untuk jumlah penduduk pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.125.369 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 559.302 jiwa (49,70%), perempuan 566.067 jiwa (50,30%) dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,73 % dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 305.376. Penduduk Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada usia rentan usia produktif 15-60 tahun.

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman menurut Kecamatan Tahun 2011 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman menurut Kecamatan Tahun 2011

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kecamatan Gamping	47.343	47.530	94.873
2.	Kecamatan Godean	37.362	37.890	75.252
3.	Kecamatan Moyudan	37.362	37.890	37.790
4.	Kecamatan Minggir	18.925	19.986	38.911
5.	Kecamatan Seyegan	26.489	27.383	53.872
6.	Kecamatan Mlati	48.732	49.136	97.868
7.	Kecamatan Depok	65.787	64.782	130.659
8.	Kecamatan Berbah	25.528	25.768	51.296
9.	Kecamatan Prambanan	32.959	30.344	63.303
	Kalasan			
10.	Kecamatan Kalasan	36.253	36.752	73.005
11.	Kecamatan Ngemplak	30.449	31.476	61.925
	Ngaglik			
12.	Kecamatan Ngaglik	49.468	50.043	99.511
13.	Kecamatan Sleman	34.182	35.072	69.254
14.	Kecamatan Tempel	32.850	33.563	66.144
15.	Kecamatan Turi	19.761	20.422	40.183
16.	Kecamatan Pakem	18.857	19.504	38.361
17.	Kecamatan Cangkringan	16.233	16.929	33.162
	Jumlah	559.302	556.067	1.125.369

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sleman

Pada tabel 2.3 jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 1.125.369 jiwa. Dengan kualifikasi jumlah laki-laki lebih banyak dengan jumlah 559.302 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 556.067 jiwa. Kecamatan terbanyak penduduk laki-laki terdapat di Kecamatan Depok dengan jumlah 65.787 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terbanyak perempuan terdapat di Kecamatan Depok dengan jumlah 64.782 jiwa.

b. Ketenagakerjaan

Gambaran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4 Proporsi Penduduk Kabupaten Sleman yang Berkerja Per Lapangan Usaha (%) Tahun 2011

No	Sektor	Tahun				
110	Sektor	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)		
1.	Pertanian	20,31	24,39	28,26		
2.	Pertambangan dan	0,67	3,33	2,47		
	Penggalian					
3.	Industri	12,83	8,05	11,24		
4.	Listri, Gas dan Air	0,30	2,20	2,06		
5.	Bangunan	7,77	8,01	11,47		
6.	Perdagangan	26,36	12,10	10,53		
7.	Angkutan dan Komunikasi	3,42	4,00	4,23		
8.	Keuangan	3,43	3,35	4,8		
9.	Jasa-jasa	24,90	34,57	24,95		
	Jumlah	100,00	100,00	100,00		

Sumber :Pemerintah Kabupaten Sleman

Dapat di lihat pada tabel 2.4 bahwa pada tahun 2011 sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Sleman tersbesar bergerak di sektor pertanian sebanyak 28,26% dan sektor jasa-jasa sebanyak 24,95%. Sedangkan mata pencaharian terkecil pada sektor listrik, gas dan air hanya sebesar 2,06%.

Gambaran jumlah angkatan kerja Kabupaten Sleman tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Angkatan Kerja

No	Uraian	2009	2010	2011
1.	Bekerja	422.490	415.295	484.405
2.	Tidak Bekerja	45.534	58.295	39.921
3.	Jumlah	468.024	473.590	524.326
4.	Presentase tidak bekerja	9,73	12,31	7,61
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman

Pada tabel 2.5 jumlah yang bekerja mengalami peningkatan pada tahun 2010 dari jumlah 415.295 menjadi 484.405 jiwa untuk tahun 2011. Sedangkan jumlah yang tidak bekerja juga mengalami penurunan dari 12,31 menjadi 7,61 jiwa. Presentase untuk yang tidak bekerja mengalami penurunan dari tahun 2010 sebanyak 12,31% dan pada tahun 2011 menjadi 7,61%.

B. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

1. Sejarah Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap Kabupaten dapat membentuk lembaga daerah sesuai dengan kbutuhan, karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2000 tentang Organisasi Peragkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. dalam penataan kelembagaan ini, Bagian Keuangan Sekda, Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah dengan harapan Pemerintah dapat mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. sebagai salah satu hasil evaluasi penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. Seiring dengan perkembangan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan urusan pemerintah dengan memperlihatkan kebutuhan potensi, cakuoan tugas, jumlah kepadatan penduduk, kemampuan keuangan serta sarana dan prasarana daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan penataan kembali kelembagaan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Beberapa ketentuan dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, yang diubah diantaranya adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA).

2. Visi dan Misi Pendapatan Daerah

a. Visi

Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan Visi yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu: "TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN DAERAH SEBAGAI INSTITUSI YANG PROFESIONAL DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH".

Pengertian visi terwujudnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai institusi yang profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah suatu suatu kondisi dimana peran pegawai memiliki keunggulan yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah serta para pegawai yang memiliki pribadi yang tangguh dan handal, keterampilan yang aktual serta berwawasan luas sebagai landasan tindakan-tindakannya yang penuh pertimbangan dan mempunyai sikap positif.

Visi Dinas Pendapatan Daerah jga merupakan petunjuk dan arah yang mengikat bagi setia staf dan pimpinan dalam organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi, bukan hanya pada tahap memulai tetapi pada seluruh ritme kehidupan organisasi. Oleh karena itu pencapaian visi akan berhasil pada komitmen seluruh staf pimpinan.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi Dinas Pendapatan Daerah dirumuskan misi sebagai berikut:

a) Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel.
- c) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
- d) Meningkatkan Aparatur yang Profesional.

Penjelasan Misi:

a) Mewujudkan Masyarakat Taat Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan daerah. Dengan demikian masyarakat semakin sadar akan kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan yang Akuntabel.
 Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan
 Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sistem administrasi
 perpajakan dengan menggunakan sistem informasi teknologi.
- Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendpatan Daerah.
 Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka menggali dan mengembangkan pendapatan daerah.
- d) Meningkatkan Aparatur yang Profesional.

Misi ini merupakan upaya Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kapasitas pegawai dalam rangka memberikan pelayanan prima dan wajib pajak.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- 1. Perumusan kebijakan teknis bidnag pendapatan daerah
- 2. Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah
- 3. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah
- 4. Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah
- Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 2 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman



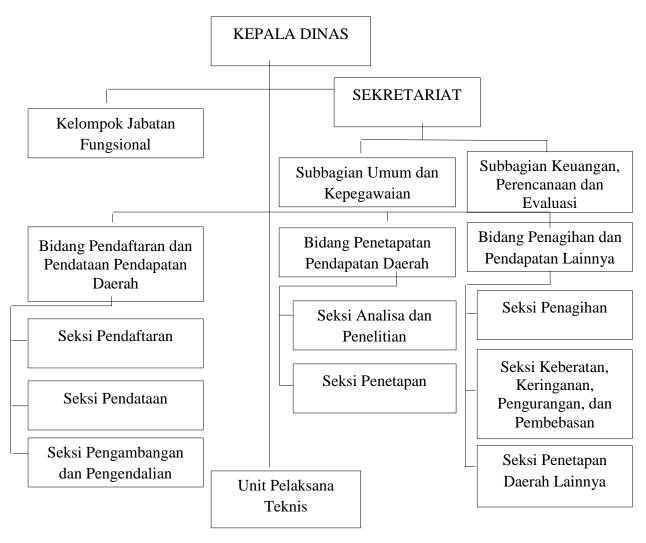
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dab Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah tediri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Pendataan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
- d. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Analisi dan Penelitia; dan
 - 2. Seksi Penetapan.
- e. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya terdiri dari:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Keberatan, keringanan, Pengurangan dan Pembebasan; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2. 6 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah



Sumber: Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

5. Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Bidang

a. Sekretariat

a) Tugas Pokok

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretariat Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- 1. Penyususnan rencana kerja Sekretariat
- 2. Perumusan kebijakan teknis kesekretasiatan
- 3. Penyelenggaraan urusan umum Dinas Pendapatan Daerah
- 4. Penyelenaggaraan urusan kkegawaian Dinas Pendapatan Daerah
- 5. Penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Pendapatan Daerah
- Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi di Dinas
 Pendapatan Daerah
- 7. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- 8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana rencana kerja Sekretariat

b. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

a) Tugas Pokok

Menyelenggarakan dan membina pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah.

b) Fungsi

- Penyusunan rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataan pendapatan daerah
- Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah
- 3. Penyelenggaraan pendaftaran pendapatan daerah
- 4. Penyelenggaraan pendataan pendapatan daerah
- Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah
- 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana rencana kerja bidang pendaftaran dan pendataanpendapatan daerah.

c. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah

a) Tugas Pokok

Menyelengarakan analisa, penelitian dan penetapan pendapatan daerah.

b) Fungsi

- 1. Penyusunan rencana kerja bidang penetapan pendapatan daerah
- 2. Perumusan kebijakan teknis, penelitian dan penetapan pendapatan daerah
- 3. Penyelenggaraan analisis dan peneliian pendapatan daerah
- 4. Penyelenggaraan penetapan pendapatan daerah
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana rencana kerja bidang penetapan pendapatan deaerah

d. Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lainnya

a) Tugas Pokok

Menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya.

b) Fungsi

- Penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan pendapatan daerah lainnya
- Perumusan kebijakan teknis penagihan pendapatan daerah, pelayanan, keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah lainnya
- 3. Penyelenggaraan pelayanan penagihan pendapatan daerah
- 4. Penyelenggaraan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pendapatan daerah
- Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengelolaan pendapatan daerah lainnya
- 6. Evaluasi dan penyususnan laporan pelaksana rencana kerja bidang penagihan dan pendapatan daerah lainnya.

6. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki-laki	29 orang
Perempuan	25 orang
Jumlah	54 orang

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Pada tabel 2.7 jumlah pegawai di Dinas Pendapatan Daerah adalah 54 orang. Dengan kualifikasi jumlah laki-laki lebih banyak dengan jumlah 29 orang sedangkan jumlah perempuan hanya berjumlah 25 orang saja.

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah menurut golongan sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
I	2 orang
II	8 orang
III	39 orang
IV	5 orang
Jumlah	54 orang

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Pada tabel 2.8 sebagian besar jumlah terbanyak pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah adalah golongan III dengan jumlah 39 orang dan golongan II berjumlah 8 orang. Sedangkan golongan yang paling sedikit adalah golongan I dengan jumlah 2 orang dan golongan IV berjumlah 5 orang.

Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah menurut tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Jumlah Pegawai Menurut Tigkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
SD	1 orang
SLTP	3 orang
SLTA	18 orang
D3	4 orang
S1	18 orang
S2	10 orang
Jumlah	54 orang

Sumber: Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman

Pada tabel 2.9 sebagian besar jumlah pegawai terbanyak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah adalah pada tingkat pendidikan SLTA dan S1 dengan jumlah 18 orang. Sedangkan yang paling sedikit jumlah pegawainya pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 1 orang.

C. Profil dan Jumlah Hotel di Kabupaten Sleman

1. Profil Hotel di Kabupaten Sleman

Hotel bintang adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setisp orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dnegan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

Persyaratan tersebut antar lain mencakup:

- a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
- b. Bentuk pelayanan yang diberikan.
- c. Kualifikasi tenaga kerja seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan.

- d. Fasilitas olah raga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik.
- e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel-hotel berikut adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan Direktorat Jendral Pariwisata, seperti penginapan remaja, pondik wisata. Hotel melati/ losmen/ penginapan adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atauseluruh bagia bangunan. Penginapan remaja adalah usaha penyediaan jasa dalam rangka kegiatan pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan, pengalaman dan perjalan. Pondok wisata adalah usaha penyedia jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian, yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya.

Fasilitas-fasilitas standar yang di miliki hotel hotel meliputi :

- 1. Kamar ber AC
- 2. Kamar ber TV
- 3. Freezer
- 4. Brankas
- 5. Rak koper
- 6. Tempat penyimpanan pakaian
- 7. Meja dan kursi duduk
- 8. Pemanas air
- 9. Peralatan tulis untuk tamu

- 10. Denah lokasi kamar dan petunjuk pelayanan diri
- 11. Lampu baca
- 12. Saluran komunikasi internal dan eksternal
- 13. Jaringan internet
- 14. Smoke detector dan Sprinkeler
- 15. Ceemin panjang
- 16. Air mandi panas dan dingin
- 17. Perlengkapan dan handuk mandi
- 18. Tempat sampah
- 19. Wastefel, kloset, shower/bak mandi
- 20. Petunjuk arah kiblat
- 21. Tanda dilarang mengganggu atau permintaan pemebersihan kamar

Fasilitas penunjang seperti:

- 1. Penanda arah fasilitas hotel
- 2. Area parkir
- 3. Lift
- 4. Toilet umum
- 5. Ruang pertemuan
- 6. Tempat ibadah
- 7. Lapangan tenis
- 8. Loundry
- 9. Kolam renang

- 10. Tempat penukaran uang
- 11. Minimarket
- 12. Agen perjalanan wisata
- 13. Toko cindera mata
- 14. Ruang pemeriksaan kesehatan
- 15. Toko obat
- 16. Pelayanan antar jemput
- 17. WIFI

Fasilitas lainnya seperti:

- 1. Kafe
- 2. Restoran/ rumah makan
- 3. Bar
- 4. Pusat kebugaran
- 5. Spa

2. Jumlah Hotel di Kabupaten Sleman

Berikut penulis lampirkan data jumlah hotel bintang dan non bintang yang ada di Kabupaten Sleman tahun 2013-2015 :

Tabel 2. 10 Jumlah Hotel Bintanng dan Non Bintang di Kabupaten Sleman Tahun 2013-2015

				Klasifik	asi Hotel				
No	Kecamatan	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang	Bintang	Non Bintang
		20	13	20	14	20	15	20	16
1.	Moyudan	-	1	-	ı	-	ľ	-	-
2.	Minggir	-	1	-	1	-	ı	-	-
3.	Sayedan	-	1	-	1	-	ı	-	-
4.	Godean	-	1	-	1	-	ı	-	-
5.	Gamping	-	5	-	3	-	4	-	4
6.	Mlati	1	13	2	13	2	12	10	11
7.	Depok	17	29	21	32	21	32	21	32
8.	Berbah	-	1	-	1	-	1	-	1
9.	Prambanan	-	1	-	1	-	ı	-	-
10.	Kalasan	1	2	1	2	1	3	1	3
11.	Ngemplak	-	3	-	3	-	4	-	4
12.	Ngaglik	1	9	1	8	1	8	1	8
13.	Sleman	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Tempel	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Turi	-	1	-	1	-	1	-	1
16.	Pakem	1	275	1	265	1	259	1	254
17.	Cangkringan	-	43	-	38	-	39	-	38
	Jumlah	21	379	26	366	26	363	34	356
Jı	ımlah Hotel	40		3	92	38		39	90

Direktori Hotel dan Akomodasi Lain DIY 2015

Dapat di lihat pada tabel 2.10 bahwa jumlah hotel pada setiap tahunnya mengalami pengurangan. Jika dilihat pada tahun 2013 jumlah hotel ada 400 hotel dengan kualifikasi hotel bintang berjumlah 21 hotel dan hotel non bintang berjumlah 379 hotel. Pada tahun 2014 terdapat 392 hotel yaitu bertambah 5 dari hotel bintang dan berkurang 13 dari hotel non bintang. Pada tahun 2015 mengalami pengurangan hotel lagi pada hotel non bintang sebanyak 3 hotel menjadi 389 hotel dan hotel bintang masih sama pada tahun 2014 yaitu 26 hotel. Sedangkan pada tahun 2016 hotel non bintang mengalami

pengurangan sebanyak 7 hotel menjadi 356 sedangkan pada hotel bintang mengalami peningkatan 8 hotel menjadi 34 hotel.

Seperti yang terlihat pada tabel 2.10 bahwa pada tahun 2016 jumlah hotel non bintang terbanyak terdapat di Kecamatan Pakem yaitu terdapat 254 hotel non bintang. Mengingat letak Kecamatan Pakem yang berada di lereng gunung merapi dan memiliki objek wisata kaliurang membuat sektor seperti perdagangan, jasa, hotel dan restoran mendapatkan pendapatan yang baik. Maka tidak heran apabila hotel yang berkembang di Kecamatan ini lebih banyak dari Kecamatan lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa daerah Kecamatan Pakem ini setiap tahunnya jumlah hotel non bintang mengalami pengurangan. Hal ini di sebabkan oleh fokus tujuan dari pembangunan hotel di Sleman yang tertuju pada hotel berbintang. Banyaknya pembagunan rumah kos exclusif yang saat ini sudah menjadi trend, jika di lihat dari segi fasilitas yang diberikan hampir sama seperti hotel bintang dan untuk harga yang diberikan pun bervariasi. Pelanggan bisa memilih kelas yang ditawarkan oleh rumah kos tersebut. kemudian pelanggan bisa memilih harian, mingguan, dan bulanan.

Tabel 2. 11 Klasifikasi Hotel Berdasarkan Kelas di Kabupaten Sleman tahun 2015

Klasifikasi Hotel Berdasarkan Kelas								
Bintang 1	g 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 ***		Bintang 5					
Hotel Paku	Hotel Poeri	Hotel Cakra	Hotel Crystal	Hotel Hyatt				
Mas	Devata Resort Hotel	Kembang	Lotus	Regency				
Hotel Seturan	Hotel UNY	Hotel Cakra	Hotel Grand	Hotel Royal				
		Kusuma	Cokro	Ambarukmo				
-	Hotel The	Hotel Griya	Jayakarta	Hotel				
	Victoria	Persada	Yogyakarta	Sheraton				
			Spa dan	Mustika				
			Hotel					
-	-	Hotel Kangen	Hotel	-				
		Boutiq	Jogjakarta					
		_	Plaza					
_	-	Hotel LPP	Hotel Merapi	-				
		Convention	Merbabu					
_	-	Hotel puri	Quality Hotel	-				
		Artha	Yogyakarta					
_	-	Hotel Quin	Hotel Sahid	-				
		Colombo	Raya Yogya					
_	-	Hotel	The Sahid	-				
		Sejahtera	Rich Jogja					
		Family	Hotel					
-	-	Hotel Sri	-	-				
		Wedari						
-	-	Hotel MM	-	-				
		UGM Wisma						

Direktori Hotel dan Akomodasi Lain DIY 2015

Untuk hotel berbintang 5 yang ada di Kabupaten Sleman ada 3 yaitu hotel Royal Ambarrukmo, hotel Hyatt Regency dan hotel Sheraton Mustika. Untuk rata-rata harga non suite pada hotel Royal Ambarrukmo ini sejumlah Rp. 860.000 - Rp 1.450.000 dan untuk harga suite sejumlah Rp 2.600.000 - Rp 6.050.000, dengan jumlah kamar sebanyak 247 *room* dan tempat tidur 325 *bed.* Harga non suite pada hotel Hyatt Regency sejumlah Rp. 888.000 - Rp 1.388.000 dan untuk harga suite sejumlah Rp 2.388.000 - Rp 6.388.000,

dengan jumlah kamar sebanyak 269 *room* dan tempat tidur sebanyak 368 *bed*. Sedangkan untuk harga non suite pada hotel Sheraton Mustika ini sejumlah Rp. 858.000 - Rp 1.584.000 dan untuk harga suite sejumlah Rp 1.848.000 - Rp 2.722.000, dengan jumlah kamar sebanyak 246 *room* dan tempat tidur sebanyak 365 *bed*.